



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570 Indonesia
Telepon (021) 4240406, 42882249
Email : kontak@bpfkjakarta.or.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat Nya Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan melalui perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada tahun 2022 serta dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepala Balai Pengamanan Fasilitas
Kesehatan Jakarta,

Subadri, ST.M.Si.
NIP.197611122005011003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta ini merupakan salah satu media penyampaian capaian kinerja yang telah dirangkum sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 ini, dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator untuk menilai pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dari 10 Indikator Kinerja Utama ada 8 Indikator Kinerja yang melebihi target adalah :

1. Jumlah ruang lingkup pelayanan target 210 tercapai 269 pelayanan.
2. Jumlah ruang lingkup akreditasi target 80 tercapai 95.
3. Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki target 56 tercapai 64.
4. Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator target 90% tercapai 100%.
5. Presentase institusi penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan target 80% tercapai 81%
6. Presentase pemenuhan kompetensi SDM target 85% tercapai 94%.
7. Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan target 40000 tercapai 55192
8. Pendapatan PNBP target Rp9.000.000.000 tercapai Rp15.108.359.000.

Pagu anggaran Dipa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPK) Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 32.357.145.000,- terdiri dari : Rupiah Murni (RM) sebesar Rp24.631.545.000,- dan PNBP sebesar Rp7.725.600.000,-

Realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp29.902.870.959,- atau sebesar (92,42%), realisasi sumber dana dari rupiah murni sebesar Rp22.782.216.623,- atau sebesar (92,49%), realisasi sumber dana dari PNBP sebesar Rp7.120.654.336,- (92,17%).

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksklusif	4
Daftar Isi	5
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Penjelasan Umum Organisasi	6
C. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	8
D. Aspek Strategis Organisasi serta permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi	8
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja	12
II.1 Perencanaan Kinerja	12
II.2 Perjanjian Kinerja	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16-53
A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	
A.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
A.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	
A.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.	
A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja	56
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	58
3. Realisasi Anggaran	59-69
4. SK Tim LAKIP	70-71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktur Pelayanan Kesehatan bersama Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, terdiri atas 8 (delapan) sasaran program, yaitu Terwujudnya kepuasan pelanggan, Peningkatan cakupan jenis pelayanan Sarana Prasarana alat yang terakreditasi, Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta, Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sesuai visi dan misi BPFK Jakarta, Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan, Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran program tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) indikator, yaitu:

1. Indeks kepuasan pelanggan.
2. Jumlah ruang lingkup pelayanan
3. Penambahan ruang lingkup Akreditasi
4. Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki
5. Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator
6. Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan

7. Persentase pemenuhan kompetensi SDM
8. Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan
9. Pendapatan PNBP
10. Realisasi anggaran

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta di masa yang akan datang.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
3. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
4. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
5. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
6. Pengukuran luaran radiasi terapi;
7. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan
9. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan;
11. Pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi BPK

Susunan organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai berikut :

1. BPK Jakarta Tipe A;
2. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPK;

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :



C. Aspek Setrategis Organisasi serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

1. Aspek strategis organisasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta antara lain :
 - a. Memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur yang ada di Laboratorium kalibrasi swasta, laboratorium internal di Rumah Sakit dan Laboratorium kalibrasi di Dinas Propinsi dan Kabupaten Kota.
 - b. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Penguji swasta, laboratorium kalibrasi internal rumah sakit dan laboratorium kalibrasi di dinas propinsi dan kabupaten kota di wilayah binaan yang sudah ditetapkan pemerintah.

- c. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes.
 - d. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui uji produk alat kesehatan.
 - e. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.
2. Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :
- a. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
 - b. Menjadi rujukan nasional dalam pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah institusi penguji swasta terus meningkat.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPFK untuk mampu mengoptimalkan pelayanan pengujian/kalibrasi, proteksi radiasi dan inspeksi diseluruh fasyankes.
 - d. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) BPFK untuk terus meningkatkan kompetensinya.
 - e. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga meningkat.
 - f. Meningkatnya jumlah alat kesehatan setiap tahun akan meningkatkan juga permintaan pelayanan kalibrasi.
 - g. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi.
 - h. Memenuhi permintaan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.

- i. Perencanaan perubahan sistem pengelolaan keuangan dari Non BLU menjadi sistem pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

D. Sistematik

Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta selama tahun 2022, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan satu tahun.

Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan demikian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issud*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta capaian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Dalam rencana kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPFK Jakarta dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi, adapun Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi institusi pengujian fasilitas kesehatan rujukan nasional dengan pelayanan prima”

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi BPFK Jakarta yang menggambarkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPFK Jakarta. Adapun misi BPFK Jakarta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan standar dan menjangkau seluruh fasyankes di propinsi-propinsi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Membina balai pengujian fasilitas kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.

3. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta melaksanakan perencanaan kinerja melalui proses penetapan kinerja dalam satu tahun anggaran 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan program indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BPK JAKARTA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)						
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	Indeks kepuasan pelanggan	Nilai					
				- Internal	68			
				- Eksternal	74	88	80	92
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2.1 Jumlah ruang lingkup pelayanan	Jml	129	155	210	165	170
		2.2 Penambahan ruang lingkup Akreditasi	Jml	54	60	80	70	75
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	3.1 Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Jml	30	45	56	65	75
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPKF Jakarta	4.1 Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	%	55	100	90	100	100
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	5.1 Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	%	50	70	80	90	100
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPKF Jakarta	6.1 Persentase pemenuhan kompetensi SDM	%	65	75	85	95	100
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7.1 Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	Jml	35000	40000	40000	45000	50000
8	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	8.1 Pendapatan PNBP	Jml	8 M	8.5 M	9 M	9.5 M	10 M
		8.2 Pemenuhan LAKIP		95	-	-	-	-
		8.3 Realisasi Anggaran		100	100	95	96	97

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Target kinerja ini menjadi komitmen Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta untuk mencapainya pada tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	1.1	Indeks kepuasan pelanggan	80
2	Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2.1	Jumlah ruang lingkup pelayanan	210
		2.2	Penambahan ruang lingkup Akreditasi	80
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	3.1	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	56
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	4.1	Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	90 %
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta	5.1	Persentase peserta uji yg memenuhi persyaratan	80 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
		(1)	(2)	(3)
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	6.1	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	85 %
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7.1	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan	40000
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	8.1	Pendapatan PNBP	9 M
		8.2	Realisasi Anggaran	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

KPI.1 Indeks kepuasan pelanggan

kepuasan pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dari BPK Jakarta

Target yang ditetapkan adalah 80.

Tabel KPI.1
Indeks Kepuasan Pelanggan

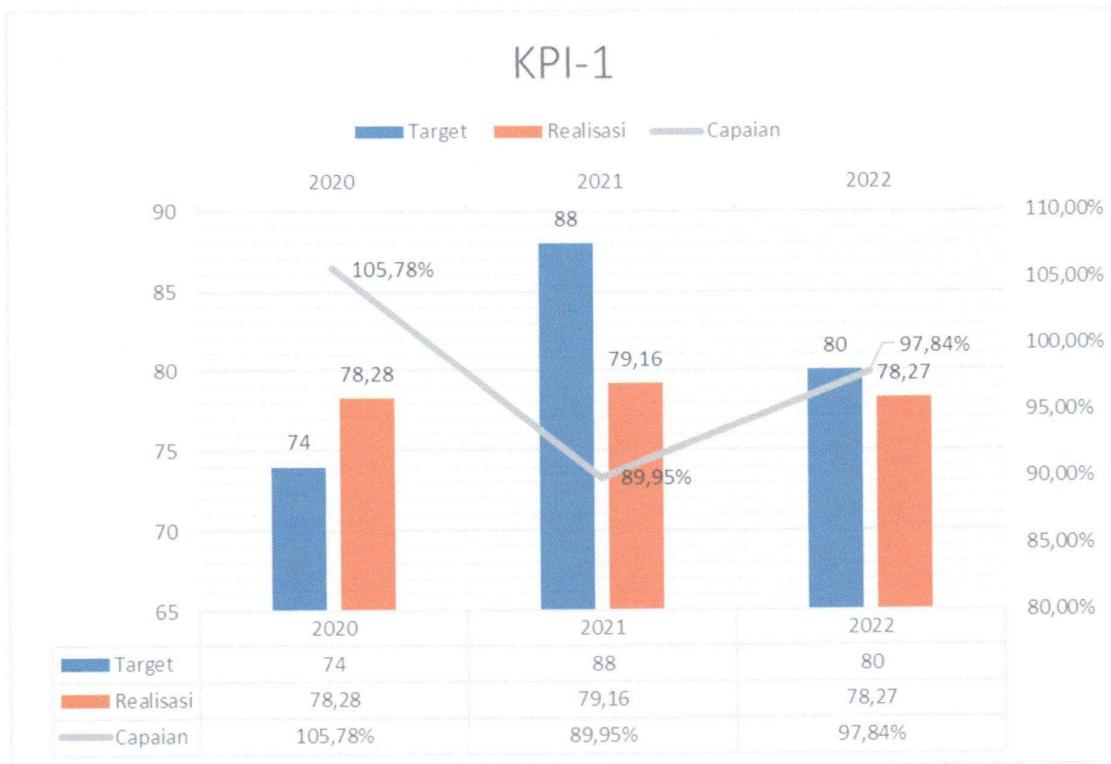
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2022	2022
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	Taop	80	78,27

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :
Target indikator kinerja Indeks Kepuasan pelanggan 80 dan realisasi 78,27 maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator adalah **BAIK**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	Taop	74	88	80	78,28	79,16	78,27	105.78%	89.95%	97.84%

Realisasi kinerja indeks kepuasan pelanggan Tahun 2022 sebesar 78,27, Tahun 2021 sebesar 79,16 dan Tahun 2020 sebesar 78,28.

Grafik, Indeks Kepuasan Eksternal



3. Realisasi indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2022 sebesar 78,27 dan realisasi tahun 2021 sebesar 79,16, sehingga terjadi pencapaian masing-masing sebesar 97,84 % dan 89,95 %.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan Nilai Interval Konversi IKM pada Permen PAN RB No 14 tahun 2017 tentang indek kepuasan masyarakat

(pelanggan eksternal) yang bisa dibandingkan yaitu 76,61 – 88,30 mendapat nilai mutu pelayanan B.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisa capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal yaitu ;

Nilai Rata-rata Unsur dari Unsur Pelayanan menunjukkan gambaran hasil penilaian seluruh indikator dalam survey ini. Dari sembilan indikator tersebut terdapat dua indikator yang dapat dikatakan dalam kategori yang paling baik adalah : Unsur Perilaku Pelaksana dan Unsur Sarana Prasarana, sementara indikator yang menurut responden paling tidak baik kondisinya adalah unsur waktu penyelesaian dan unsur Biaya/Tarif, Saran dan Masukan. Pengukuran kinerja waktu penyelesaian uji profisiensi kalibrasi alkes hasilnya dinilai kurang baik menunjukkan bahwa Responden masih belum cukup puas dengan waktu penyelesaian yang ada walau pada kenyataannya, BPK Jakarta sudah memberikan waktu penyelesaian selama 30 hari kerja. Adapun unsur Biaya/Tarif juga dinilai masih cukup mahal

Alternatif Solusi :

Rencana tindak Lanjut SKM antara lain :

- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan BPK Jakarta
- b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal BPK Jakarta
- c. Pengambilan e-sertifikat layanan BPK Jakarta
- d. Pelaksanaan sistem reward & punishment bagi pegawai BPK Jakarta terhadap kinerja layanan

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Survey pengambilan data secara langsung atau menggunakan media elektronik dan analisa dilakukan oleh staf seksi Tata Operasional

1. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum
2. Alokasi anggaran dalam Dipa sebesar Rp 190.160.000 dan realisasi sebesar Rp 177.578.620,- atau 93,38 %.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kepuasan pelanggan BPK Jakarta perlu ditunjang oleh pertemuan pelanggan, integrasi pelaporan dan monitoring evaluasi pelayanan serta peningkatan jejaring kerja antar laboratorium.

KPI. 2 Jumlah ruang lingkup pelayanan

Ruang lingkup pelayanan BPK Jakarta adalah Jenis pelayanan jasa yang diberikan meliputi kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profisiensi yang mengacu pada Permenkes 54 tahun 2015, Pemenkes 61 tahun 2020, PP 64 tahun 2019 dan pedoman teknis di K/L terkait.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 210 pelayanan.

Tabel KPI. 2
Jenis Ruang Lingkup Pelayanan

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET		REALISASI	
			2022	2022	2022	2022
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Taop	210		269	

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 210 dan realisasi kinerja sebesar 269, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja penambahan jenis ruang lingkup pelayanan **Sangat Baik.**
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Taop	129	155	210	130	187	269	100.78 %	120.65 %	128.10 %

3. Realisasi kinerja jenis ruang lingkup pelayanan Tahun 2022 sebesar 269 jenis alat, Tahun 2021 sebesar 187 jenis alat dan Tahun 2020 sebesar 130 jenis alat. Sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 128,10 %, Tahun 2021 sebesar 120.65 % dan Tahun 2020 sebesar 100,78 %.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET				2020	2021	2022	REALISASI		
			2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022
KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Taop	129	155	210	221	130	187	269			

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 269 dengan target jangka menengah pada rencana strategis tahun 2022 sebesar 210 terdapat peningkatan sebesar 128,10 %.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja yaitu :
 - 1. Tersedianya Sumber daya yang kompeten.
 - 2. Penambahan pelayanan uji produk, uji profisiensi dan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dan alat ukur.

7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

- a. Mudah mendapatkan akses informasi dokumen standar
- b. Narasumber dari luar yang professional mudah diakses.
- c. Kemampuan dari sumber daya pelaksana yang berpengalaman.
- d. Alokasi dana untuk menunjang kegiatan ini sebesar Rp284.122.000,- realisasi sebesar Rp268.911.210,- atau 94,65 %.

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat kegiatan penyusunan dan uji coba metode serta pengadaan peralatan alat ukur.

KPI.3 Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi

Ruang lingkup yang terakreditasi adalah jumlah jenis layanan yang terakreditasi sesuai persyaratan yang tercantum dalam dokumen acuan nasional (SNI/PERBA dll) atau internasional (ISO/IEC/NIST/ASTM dll). Akreditasi diberikan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang (KAN/ BAPETEN / PPSDM/ BNSP).

Target yang ditetapkan Tahun 2022 adalah 80 ruang lingkup.

Tabel KPI.3
Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET		REALISASI	
			2022	2022	2022	2022
KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Taop	80		95	

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan 80 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 95, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator ini **Sangat Baik**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Taop	52	60	80	54	79	95	104%	132%	119%

Realisasi penambahan ruang lingkup yang terakreditasi tahun ini 15 lingkup dan realisasi tahun 2020 ada 2 lingkup dan capaian kinerja tahun ini sebesar 119% dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 104%, maka dapat dinyatakan tercapai.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET				REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Taop	52	60	80	85	54	79	95	-	

Realisasi kinerja tahun 2022 jumlah akreditasi 15 lingkup sehingga tidak dibandingkan dengan target jangka menengah.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisa penyebab keberhasilan capaian kinerja yaitu :

Jadwal survailen/akreditasi yang bersamaan pada tahun 2022 ada 3 Laboratorium (Lab. Lab PRUK, Lab Uji Produk, dan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) serta kesiapan seluruh personil Laboratorium dengan personil Tata Operasional dalam menghadapi Survailen/Akreditasi sehingga target kinerja tercapai.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi, dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)
- b. Alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp259.686.000,- dan realisasi sebesar Rp246.213.000,- atau 94.81%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kebutuhan untuk Jaminan pelayanan sesuai dengan Permenkes no 54 tahun 2015 dan Standar Nasional Indonesia serta kepercayaan pelanggan pada Lembaga yang terakreditasi.



KPI.4 Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki

SOP yang terdapat di BPK Jakarta terdiri dua jenis yaitu SOP Administrasi dan SOP teknis. SOP Administrasi meliputi SPM dan SOP-AP, sedangkan SOP Teknis terdiri dari Prosedur Operasional dan Metode kerja.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 56 SOP.

**Tabel KPI.4
Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET		REALISASI	
			2022	2022	2022	2022
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Taop	56		64	

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 56 SOP dan realisasi kinerja tahun ini 64 SOP, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator itu **Sangat Baik** tingkat efektifitas ini dapat ditujukan dengan sudah dilakukan perbaikan pada Sistem Operasional Prosedur (SOP).
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Taop	30	45	56	51	54	64	170%	120%	114%

Realisasi jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki tahun ini sebanyak 64 dan tahun 2021 sebanyak 54 dengan capaian Tahun 2022 sebesar 114%, Tahun 2021 sebesar 120% dan Tahun 2020 sebesar 114%, maka dapat dinyatakan ada

yang melebihi target atau sesuai target mengikuti kebutuhan pada tahun berjalan.

Grafik, Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki



3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET				2023	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Taop	30	45	56	0		51	54	64	0	

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
5. Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan :

1. Perbaikan SOP sesuai kebutuhan proses atau standar dalam rangka tindak lanjut dari audit internal dan monitoring evaluasi.
2. Perbaikan SOP rutin minimal 1 tahun merupakan prosedur pengendalian dokumen
7. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 1. Penggunaan anggaran sesuai Standar Biaya Umum
 2. Alokasi anggaran dalam Dipa sebesar Rp 414.752.000 dan realisasi sebesar Rp 401.573.850,- atau 96,82%
8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
 1. Kegiatan kaji ulang dokumen Manjemen dan Teknis
 2. Kegiatan pembuatan dan revisi metode Kerja

KPI.5 Tingkat Keandalan alat ukur dan kalibrator

Keandalan alat ukur dan kalibrator adalah kelaiakan alat ukur yang dapat dinilai antara lain melalui rekalibrasi di Institusi kalibrasi yang terakreditasi, yang hasilnya dibandingkan dengan akurasi alat ukur yang terdapat di spesifikasi alat tersebut.

Alat ukur dan kalibrator yang belum dapat di rekalibrasi maka dilakukan penjaminan mutu alat tersebut melalui pengecekan antara, uji banding, uji profisiensi dan interkomparasi

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90%.

Tabel KPI.5
Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2022	2022
KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Taop	90%	100%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

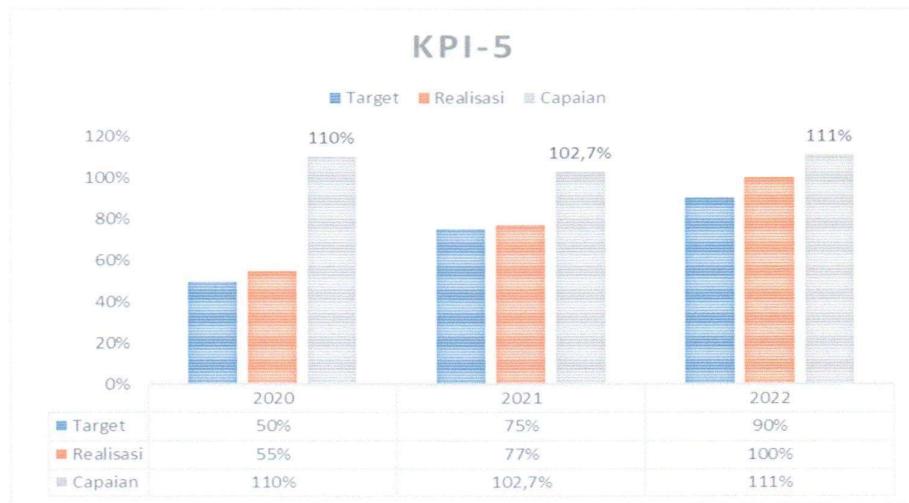
Target kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 90 tingkat keandalan dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 100 % tingkat keandalan alat, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator tercapai.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Taop	50%	75%	90%	55%	77%	100%	110%	102,7%	111%

Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 218 alat, Tahun 2021 sebesar 125 alat dan Tahun 2020 sebesar 151, sedangkan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 111%, Tahun 2021 sebesar 102,7% dan Tahun 2020 sebesar 110%, maka dapat dinyatakan ada perkembangan kinerja yang telah meningkat namun terjadi penurunan pada tahun 2021 dikarenakan pandemi covid-19.

Grafik, Jumlah Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
- Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2022 sebesar 218 alat dengan target jangka menengah pada rencana strategis BPKF terjadi peningkatan.

No.	KPI	PIC	TARGET				REALISASI				
			2020	2021	2022		2020	2021	2022	2023	
KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Taop	55%	100%	90%	92%	151%	77%	100%	108.7	

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
- Tidak ada Acuan atau pun Standar Nasional yang bisa dibandingkan.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab kegagalan :

- a. Alat Ukur masih dipakai pelayanan di Fasyankes
- b. Keterbatasan penyedia kalibrasi alat ukur antara lain Layanan SNSU BSN dan Lab Kalibrasi alat standar membatasi volume pada awal pandemi.
- c. Terbatasnya anggaran kalibrasi.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Pengunaan Laboratorium Kalibrasi AUS BPK Jakarta sesuai kemampuan
2. Seleksi Pemilihan penyedia kalibrasi pada instansi pemerintah misal BATAN, SNSU BSN, Dit.Metrologi
3. Peralatan yang tidak dapat dilakukan rekalibrasi yang tidak ada penyedia, maka dilakukan verifikasi terhadap alat sejenis.
4. Anggaran Pemeliharaan Alat Pengujian Kalibrasi sebesar Rp 1.477.776.000 telah direalisasi sebesar Rp. 1.391.619.452 (94.17%)

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Kegiatan yang menunjang : pengecekan antara dan pertemuan teknis antar laboratorium
2. Koordinasi antara jadwal rekalibrasi dengan jadwal pelayanan BPK Jakarta

KPI.6 Institusi Penguji Fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan

Pada sasaran peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta terdapat indikator kinerja berupa persentase Institusi Penguji fasilitas kesehatan (IPFK) milik pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui Bimbingan teknis dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya

- b. Memenuhi kesesuaian Permenkes No 54 tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi Alkes ,
 - c. Mendapat /perpanjangan izin operasional dari Ditjen Yankes Kemenkes.
 - d. Mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 80%.

Tabel KPI.6
Prosentase Peserta Uji yang memenuhi persyaratan

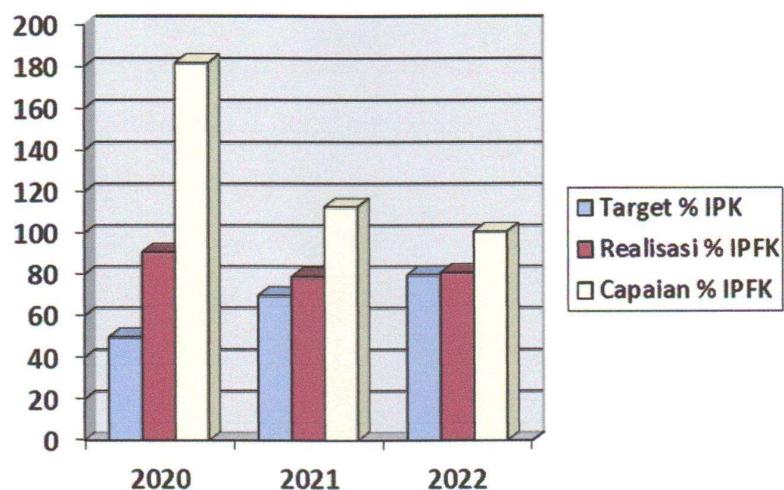
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET		REALISASI	
			2022	2022	2022	2022
KPI. 6	Persentase Institusi Penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Bimtek	80%		81%	

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 80% dan realisasi kinerja sebesar 81%, maka dinyatakan bahwa pencapaian berdasarkan indicator kinerja itu **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI. 6	Persentase Institusi Penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Bimtek	50%	70%	80%	80%	75%	81%	160%	107%	101%

3. Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian kinerja maka terlihat realisasi tahun 2022 sebesar 81% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 79%. Adapun capaian tahun 2022 sebesar 101% terlihat menurun

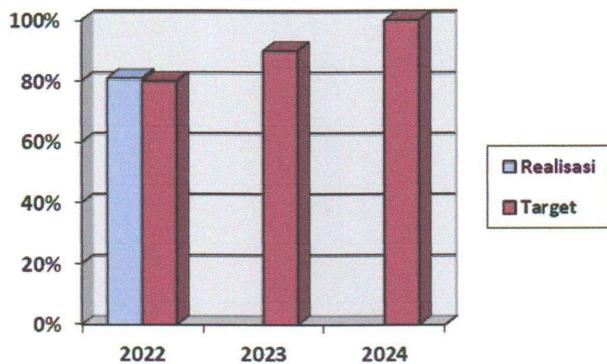
dibanding capaian 2021 sebesar 113%. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya jumlah institusi penguji Alkes di wilayah kerja BPK Jakarta pada tahun 2021 pada tahun 2022 walaupun target tahun 2021 bertambah semula sebesar 70% menjadi 80% pada tahun 2022



Grafik, Prosentase peserta uji yang memenuhi persyaratan

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini mencapai 101%, telah memenuhi target jangka menengah.

Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Jangka Menengah



5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Belum ada target secara nasional yang ditargetkan oleh regulator dalam hal ini Ditjen Pelayanan Kesehatan. Namun berdasarkan Permenkes 54 tahun 2015 , BPFK kelas A / Jakarta ditunjuk sebagai institusi pengujian Alat Kesehatan penyelenggaraan uji profisiensi pengujian dan kalibrasi Alkes dan melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, serta penelitian/bimbingan teknis.

6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan melewati angka 100% pada indikator ini yaitu :

BPFK Jakarta melakukan kegiatan kemitraan dan jejaring kerja serta bimtek/pelatihan pada IPFK pemerintah dan swasta sesuai pemenuhan Permenkes No 54 tahun 2015 . IPFK tersebut telah memenuhi persyaratan Komite Akreditasi Nasional dan regulasi untuk kewajiban Institusi Penguji / Laboratorium kalibrasi untuk mengikuti Uji Profisiensi Kalibrasi Alkes. Program kemitraan dan jejaring kerja secara umum berjalan sesuai perencanaan, promosi terhadap

penawaran kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek Uji produk, Pelatihan IPFK dan Workshop serta Webinar), Efektifitas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan Webinar , menyiapkan tema kegiatan webinar yang tepat sasaran.

Tahun 2022 dilakukan jejaringkerja dan bimbingan teknis pada 63 institusi Pengujian Kalibrasi Alkes sebagai berikut :

- 1 BPFK MEDAN
- 2 PT. CALIBRAMED
- 3 PT. ADI MULTI KALIBRASI
- 4 PT. SPEKTRUM KREASI PRATAMA
- 5 PT. GAYA DINAMIKA ANGKASA
- 6 PT. GLOBAL MAINTENANCE MANAGEMENT
- 7 PT. KALIMAN
- 8 PT. EASTERN PRO ENGINEERING
- 9 INSTALASI KALIBRASI RSCM
- 10 PT. FAMED CALIBRATION
- 11 PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICE
- 12 INSTALASI KALIBRASI RSUP KARIADI
- 13 PT. SURIA BERKAT ABADI
- 14 PT. DIDI KALIBRASI INDONESIA
- 15 PT. NAGATA MEDIKA SEJAHTERA
- 16 PT. MITRA SOLUSI ELEKTROMEDIK
- 17 PT. CALTESYS
- 18 PT. KALAM MULIA INDONESIA
- 19 PT. ANTERA KALIBRASI
- 20 PT. MANDIRI TRANSFORMA GLOBAL
- 21 PT. KALIBRATE INTI AKURASI
- 22 PT. GLOBAL QUALITY INDONESIA
- 23 PT. MUTUMED PRIMA SERVICE
- 24 PT. MEDCALINDO
- 25 PT. ASTAMA MEDIKA
- 26 PT. KALMED SEJAHTERA INDONESIA
- 27 PT. MANARA JAYA KALIBRASI
- 28 PT. INDRALOKA
- 29 LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU UGM
- 30 BALAI LABKES DAN PENGUJIAN ALKES PROP JATENG
- 31 BALAI LAB KES DAN KALIBRASI DINKES YOGYA
- 32 PT. MEDTEK
- 33 PT. RDAP
- 34 PT. SINERGI KALIBRASI NUSANTARA
- 35 PT. MITRA TERA AKURASI

36 PT. POLARITAS MULTITRANS TECHNOLOGY
37 PT. MEDITERA GLOBAL TEKNOLOGI
38 PT. DARYA HARJA SENTOSA
39 PT. EKSOGEN BROTHER
40 PT. DITA MITRA MEDIKA
41 PT. PRIMA KARYA GUNA HUSADA
42 PT. DELTA MANDIRI ABADI
43 PT. TERA EMCAL SOLUSINDO
44 PT. SINERGI INDOCAL SEJAHTERA
45 IP ALKES RS JANTUNG HARAPAN KITA
46 PT MITRA KALIBRASI SELARAS
47 PT. MUTU FISMED INDONESIA
48 PT. FUKUDA TECHNOLOGY
49 PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO)
50 PT. ANUGERAH ANALISIS SEMPURNA
51 PT. SRI INTAN PERKASA
52 UPTD INSTALASI FARMASI DAN KALIBRASI ALKES DINKEP PROP
LAMPUNG
53 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI BANTEN
54 PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL
55 PT. SINHADJI KALIBRASI PROMEDIKA
56 PT. TRIKALIBRI TEKNOLOGI INDONEISA
57 PT. MULTI INSTRUMENTASI MANDIRI
58 KALIBRASI LAPALKES PUSKESAD
59 PT. BHADRA AFIA THAMRIN SADINA
60 PT. CAHAYA REKAYASA BIOMEDIS
61 PT. ALKES INDO PRESISI
62 PT. CHIODA ALTIMA SEMESTA
63 PT. MEGAH KALIBRAMED CENTER

7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan daring/online serta meningkatkan kerjasama antara institusi. Kolaborasi dan koordinasi antara kegiatan Substansi Kemitraan dan Bimbingan Teknis dengan Substansi Tata Operasional serta personel teknis di Instalasi/Laboratorium BPK Jakarta selama pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada institusi penguji
- b. Alokasi anggaran dalam DIPA Bimtek pada Layanan penyelenggaraan Tupoksi UPT Vertikal Ditjen Yankes

sebesar Rp241.294.000,- realisasi sebesar Rp215.769.382,- atau 89,42%.

8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2022 BPK melakukan program yaitu :
 - a. Kemitraan , jejaring kerja dan promosi serta pameran .
 - b. Kegiatan Pengampuan di Unit Kalibrasi Mandiri 3 RS Vertikal
 - c. kegiatan pelatihan di IPFK Pemerintah dan swasta serta bimtek kalibrasi alat ukur .
 - d. Melalukan Sosialiasi layanan melalui webinar dan radio kemenkes serta medsos BPK Jakarta.
 - e. Menyelenggarakan uji profisiensi terakreditasi PUP 020-ID
 - f. BPK Jakarta telah ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi oleh LSP Kesehatan serta memiliki Pengampu Bapelkes Cikarang untuk pelatihan terakreditasi dan mampu melaksanakan uji kompetensi teknisi melalui uji kompetensi internal dan eksternal bersama organisasi profesi antara lain AFISMI dan IKATEMI

KPI.7 Prosentase pemenuhan kompetensi SDM

Kualitas SDM adalah SDM BPK Jakarta teknis maupun non teknis yang mengikuti program sertifikasi sesuai kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun pihak penyelenggara (BNSP, LKPP, BAPETEN, PPSDM, ESDM dan K/L terkait)

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 85%

Tabel KPI.7
Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM

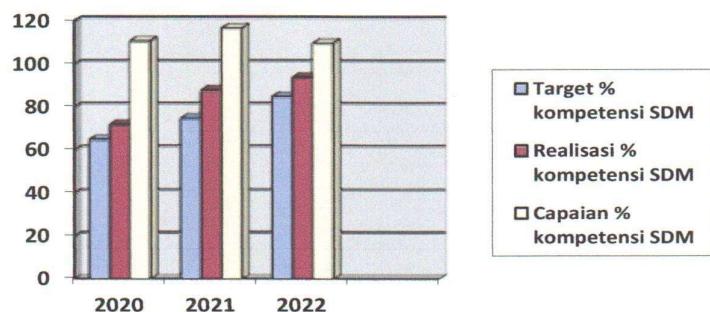
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET		REALISASI	
			2022	2022	2022	2022
KPI.7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	Bimtek	85%		94%	

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja tahun ini sebesar 85% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 94%, maka dinyatakan bahwa capaian berdasarkan indicator ini **Memuaskan**.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	Bimtek	65%	75%	85%	72%	88%	94%	111%	117%	110%

Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian kinerja maka terlihat realisasi tahun 2022 sebesar 94% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 88%. Adapun capaian tahun 2022 sebesar 110% terlihat menurun dibanding capaian 2021 sebesar 117%. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya jumlah pegawai BPK Jakarta yang mengikuti sertifikasi dan pemenuhan kompetensi SDM pada tahun 2021 dan 2022 juga bertambahnya target tahun 2021 semula sebesar 75% menjadi 85% pada tahun 2022

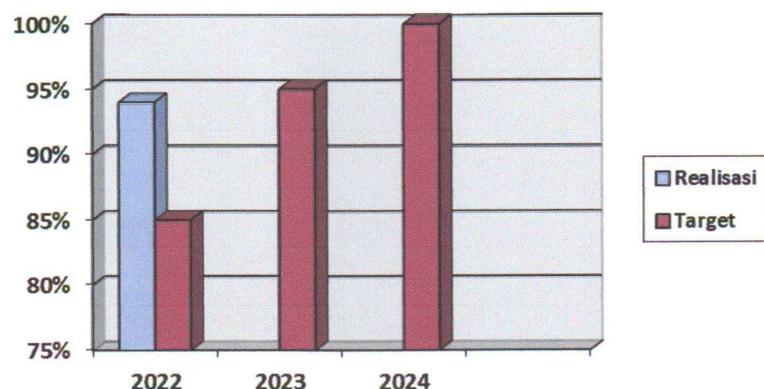
Adapun realisasi indicator kinerja dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka dapat dinyatakan ada perkembangan kenaikan kinerja yang signifikan rata-rat sebesar 6%.



Grafik Persentase pemenuhan kompetensi SDM

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah capaian tahun ini mencapai 94%, telah memenuhi target jangka menengah



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Untuk mendukung misi pemerintah tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas Indonesia dan Misi Kemenkes yaitu Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan serta sesuai dengan UU ASN No. 5 Tahun 2014,

merujuk pada PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Setiap pegawai Negeri Sipil minimal 20 JPL/tahun wajib mendapatkan pendidikan/pelatihan dalam setiap PNS di BPK Jakarta dan harus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Maka tahun 2022 realisasi kinerja 94% belum mencapai target secara nasional yaitu 100%.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - a. Analisa penyebab keberhasilan :
 1. Melakukan perencanaan pelatihan berbasis kompetensi dan Training Need Analysis sesuai kebutuhan organisasi
 2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kompetensi telah sesuai dengan programnya
 3. Ketersediaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan Tercapainya SDM yang kompeten dibidangnya.
 4. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Internal Pengujian Kalibrasi Alkes
 - b. Adapun solusi peningkatan pencapaian kinerja adalah
 1. Melalukan kegiatan pelatihan yang terakreditasi melalui pengampuan Balai Pelatihan Kesehatan
 2. Membangun jaringan kemitraan dengan stakeholder penyelenggara pelatihan dan uji kompetensi.
 3. Penunjukan BPK Jakarta sebagai Tempat Uji Kompetensi
 - c. Analisa kendala :
 1. Padatnya pelayanan dan kegiatan Laboratorium dan unit kerja untuk mengikuti program pelatihan dan uji kompetensi
 2. Kurangnya monitoring dari unit kerja dan kepala instalasi serta substansi kemitraan dan Bimtek terhadap staf yang belum kompetensi

Terdapat 34 orang yang mengikuti sertifikasi tahun 2022 dengan hasil 32 orang lulus dan 2 orang belum lulus penguji berkualifikasi pesawat sinar x sebagai berikut

Sertifikasi Tenaga Pelatih Kesehatan	2 orang
Sertifikasi Audit Internal Lab.SNI ISO/IEC 17025:2017	4 orang
Sertifikasi Pengendali Pelatihan	1 orang
Sertifikasi Teknisi Elektromedik Skema Kalibrasi Alkes Teknologi Sederhana	21 orang
Pelatihan & Sertifikasi Penguji Berkualifikasi	3 orang
Sertifikasi TOT, TNA dan Pembuatan Modul Pelatihan	3 orang

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - a. Efisiensi biaya pelatihan dilakukan dengan mengubah pelatihan menjadi inhouse training dan metode daring juga luring (menghilangkan biaya perjalanan dinas) serta menambah jumlah kuota peserta pelatihan tanpa harus menambah biaya pelatihan.
 - b. Alokasi anggaran dalam DIPA 2022 sebesar Rp1.431.098.000,- terealisasi sebesar Rp1.270.097.461,- atau sebesar 88,75%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - a. Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh Program / kegiatan yaitu :
 1. Membangun Jejaring Kemitraan dengan BRIN (BATAN, BSN / Laboratorium SNSU), Instansi Pendidikan, Bapelkes, PT Sucofindo antara lain melalui kerjasama dengan Diklat BSN
 2. Penunjukan BPK Jakarta sebagai tempat uji Kompetensi Teknisi Elektromedik Skema Kalibrasi Alkes
 3. Melakukan Koordinasi antara substansi kemitraan dan bimtek dengan unit kerja lainnya dalam merencanakan pelatihan.

4. Melakukan pelatihan inhouse training teknis dan mutu layanan sebanyak 14 kegiatan
 5. Menerapkan program pelatihan sesuai standar SNI 17025 , SNI 17020 dan 17043 serta SNI 17065
- b. Kegagalan rendahnya pencapaian realisasi anggaran yaitu :
1. Terbatasnya Penyelenggara pelatihan dan sertifikasi dari eksternal.
 2. Berkurangnya Volume penyenggaraan dari BATAN karena Perubahan struktur organisasi di BATAN menjadi bagian dari BRIN
 3. Belum adaptasi atas Perubahan Skema Sertifikasi Pengujian Berkualifikasi dari BAPETEN karena personel UPFPFK Palembang belum memenuhi jumlah fortopolio yang ditentukan.
- c. Rencana Tindak lanjut adalah melakukan :
1. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraaan serta kerjasama dengan organisasi profesi instansi lain misal IKATEMI, BRIN dan BAPETEN serta LSP Kesehatan /BNSP
 2. Menjadi Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi
 3. Menyusun kurikulum dan Modul Pelatihan kalibrasi Medium Risk
 4. Meningkatkan koordinasi dan kesiapan personel dalam melakukan kompetensi/sertifikasi.
 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga sertifikasi profesi

KPI.8 Jumlah Sertifikat /Laporan Hasil yang diterbitkan

Sertifikat/Laporan Hasil Uji adalah Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan oleh BPFK Jakarta melalui layanan kalibrasi, inspeksi, uji kesesuaian, TLD, film badge, pelatihan teknis dan non teknis, uji kompetensi , uji produk dan uji profisiensi yang

diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 40000.

Tabel KPI.8
Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil yang diterbitkan

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2022	2022
KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Yantek	40000	55192

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 40000 dan realisasi kinerja sebesar 55192 (138%) maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Memuaskan.**

Jumlah Penerbitan Sertifikat dan Laporan Hasil Uji

Periode Januari - Desember 2022

NO	URAIAN	Jan-Jun 2022	Jan-Des 2022
1	Lab Pengujian/Kalibrasi / UPF Palembang / In House	9350	32295
2	Lab. PRUK (PK/UK/PPR)	402	1254
3	TLD FB (LHU)	10144	20071
4	Lab AUS/AUR	520	1344
5	Lab. Inst. Sarana Prasarana	38	114
6	Lab Uji Produk	44	114
JUMLAH		20498	55192



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI. 8	Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Yantek	35000	40000	40000	43012	47700	55192	123%	119%	138%

Capaian indikator kinerja di tahun 2022 sebesar 138 %, tahun 2021 sebesar 119%, maka dinyatakan ada kenaikan kinerja sebesar 5%. Kenaikan ini dikarenakan penerbitan sertifikat dan Laporan sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Pelayanan).

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET			2023	REALISASI			2023
			2020	2021	2022		2020	2021	2022	
KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Yantek	35000	40000	40000	70%	43012	47700	55192	0

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 55192 (138%) dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 50000.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tidak ada Acuan ataupun Standar Nasional yang bisa dibandingkan, hanya menganalisa data penerbitan sertifikat sesuai standar pelayanan minimal BPK Jakarta.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

1. Penambahan jumlah kemampuan Layanan.
2. Terlaksananya perjanjian Kerjasama (MoU) pelayanan dengan beberapa RS Vertikal, RS Pemerintah Daerah dan RS Swasta.
3. Meningkatnya permintaan pelayanan uji produk alat kesehatan produksi dalam negeri.
4. Meningkatnya pelayanan inspeksi.
5. Adanya kegiatan sosialisasi pelayanan BPK yang bertujuan menambah minat pelanggan terhadap pelayanan di BPK Jakarta
6. Adanya program supervisi atau pemantauan pelaksanaan dan *feedback* terhadap pelayanan BPK Jakarta
7. Evaluasi MoU untuk pelaksanaan pelayanan di tahun berikutnya

b. Analisa penyebab kendala

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMPEL, dikarenakan belum tersedianya beberapa menu penunjang untuk monitoring.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan adanya aplikasi SIMPEL maka substansi Pelayanan Teknis dapat melakukan koordinasi secara on line dengan Laboratorium sehingga petugas Pelayanan Teknis tidak perlu bulak balik ke laboratorium lagi untuk meminta jadwal pelayanan dan melakukan input data.

7 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pembuatan Laporan Hasil pada SIMPEL masih dilakukan secara manual (dengan mengupload exel dan pdf) sehingga masih memungkinkan terjadinya beberapa kesalahan Laporan Hasil yang diterbitkan secara elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi pembuatan laporan hasil Pengujian/Kalibrasi

KPI.9 Pendapatan PNBP

Pendapatan PNBP adalah anggaran keuangan berdasarkan pendapatan bukan pajak yang dikutip melalui layanan BPJK Jakarta sesuai dengan pola tarif (PP 64 tahun 2019).

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp9.000.000.000,-.

**Tabel KPI.9
Pendapatan PNBP**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2022	2022
KPI.9	Pendapatan PNBP	Adum	9 M	15,1 M

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp9.000.000.000 dan realisasi kinerja tahun ini sebesar Rp15.108.359.000,- maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indikator itu **Sangat Memuaskan**.

Pendapatan PNBP BPK Jakarta Tahun 2022 di dapat dari layanan :

No	Rincian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Lab. AUR / AUS	691,113,000
2	Lab. ALKES	8,131,100,000
3	Lab. Uji Kesesuaian X-Ray:	1,226,304,000
4	Lab. Uji Produk	300,888,000
5	Lab. Pemantauan Dosis Personal	3,832,455,000
6	Lab. Sarana dan Prasarana	433,476,000
7	UJI Profisiensi	193,248,000
8	Bimbingan Teknik, Penelitian, dan PKL/Magang :	47,725,000
9	asa Evaluasi Hasil P/K oleh Fasyankes	252,050,000
	Jumlah	15,108,359,000

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.9	Pendapatan PNBP	Adum	8 M	8,5 M	9 M	9 M	10 M	15,1	113%	118%	168%



Jika realisasi indikator kinerja ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 168%, 2021 sebesar 119,32%, Tahun 2020 sebesar 112,86% maka dapat dinyatakan perkembangan kinerja yang sangat meningkat secara signifikan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	KPI	PIC	TARGET				REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
KPI.9	Pendapatan PNBP	Adum	8 M	8,5 M	9 M	17.3	9 M	10 M	15.1	87.28%	

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah capaian tahun ini sebesar 15,1 M dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 25 M maka realisasi sebesar 165,56%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 358/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Jika dibandingkan dengan Standar Nasional tidak ada.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan :

1. Adanya koordinasi yang baik dari semua pihak terkait

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

1. Adanya tim PNBP yang bertugas diantaranya melakukan folowup kepada pelanggan/customer dalam hal proses atau persyaratan pembayaran.

2. Alokasi anggaran dalam Dipa tahun 2022 sebesar Rp 7.725.600.000,- terealisasi sebesar Rp7.120.654.336,- atau 92,17%.

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan :

1. Melakukan Peningkatan pelayanan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi agar mendorong pendapatan PNBP lebih besar.

2. Melakukan koordinasi antara BPFK dengan sarpelkes

KPI.10 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah penggunaan anggaran belanja BPFK Jakarta yang terdapat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 95%.

Tabel KPI.10
Realisasi Anggaran

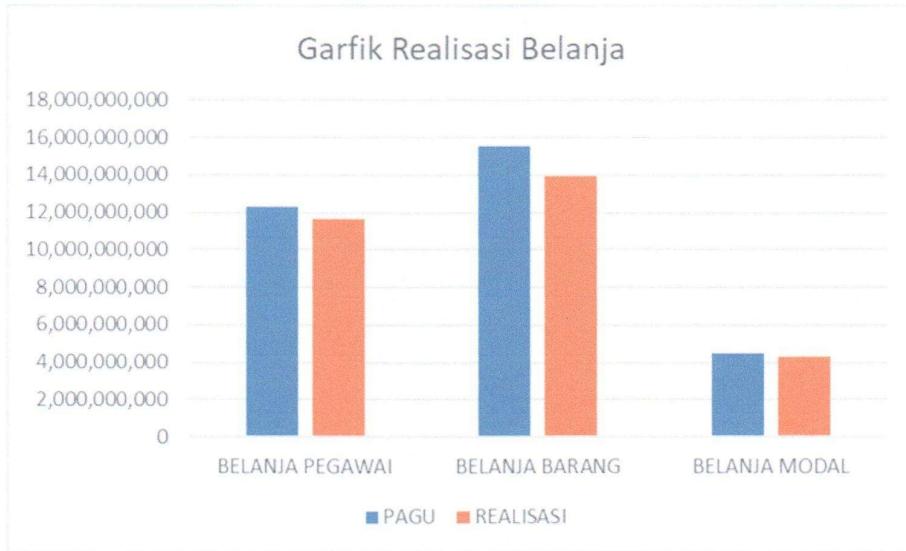
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	TARGET	REALISASI
			2022	2022
KPI.10	Realisasi anggaran	Adum	95%	92,42%

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 95% dan realisasi kinerja tahun ini sebesar 92,42%, maka dinyatakan bahwa kinerja sasaran berdasarkan indicator itu **Baik**.

Tabel Realisasi Anggaran TA 2022

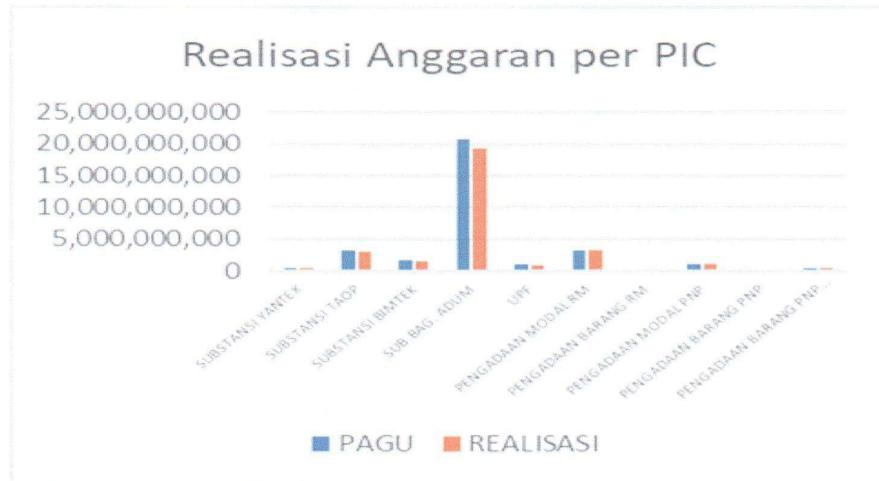
Rupiah Murni	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12,324,903,000	11,636,732,558.00	94.42
Belanja Barang	9,009,328,000.00	7,925,331,294.00	87.97
belanja modal	3,297,314,000.00	3,220,152,771.00	97.66
Jumlah	24,631,545,000	22,782,216,623	92.49
PNBP	pagu	jumlah realisasi	%
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	6,537,349,000.00	6,016,736,991.00	92.04
belanja modal	1,188,251,000.00	1,103,917,345.00	92.90
Jumlah	7,725,600,000	7,120,654,336	92.17
Jumlah Total	32,357,145,000	29,902,870,959	92.42



Realisasi anggaran yang mendukung langsung Indikator Keluaran Program Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu sebesar 92,42% dari total anggaran BPFK Jakarta sebesar **Rp32.357.145.000,-**. Pagu dalam DIPA BPFK Jakarta Tahun 2022 bersumber dana terdiri atas rupiah murni sebesar Rp24,631,545,000,- dan sumber dana PNBP sebesar 7.725.600.000,- dan masing-masing terealisasi sebesar Rp22.782.216.623,- atau 92,49% dan Rp7.120.654.336,- atau 92,17%.

Adapun alokasi pagu dan realisasi per sub bagian/Koordinator Substansi yang ada di BPFK yaitu :

PEMBAGIAN PER PIC	PAGU	REALISASI	%
SUBSTANSI YANTEK	407,553,000	369,501,402	90.66
SUBSTANSI TAOP	3,250,917,000	3,064,573,277	94.27
SUBSTANSI BIMTEK	1,672,392,000	1,485,838,643	88.85
SUB.BAG. ADUM	20,872,804,000	19,265,471,051	92.30
UPF	1,115,038,000	892,311,120	80.03
PENGADAAN MODAL RM	3,297,314,000	3,220,152,771	97.66
PENGADAAN BARANG RM	5,885,000	5,885,000	100.00
PENGADAAN MODAL PNP	1,188,251,000	1,103,917,345	92.90
PENGADAAN BARANG PNP	7,722,000	504,000	6.53
PENGADAAN BARANG PNP (CAB)	539,269,000	494,716,350	91.74
Jumlah	32,357,145,000	29,902,870,959	92.42



- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	KPI	PIC	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KPI.10	Realisasi anggaran	Adum	100%	100%	95%	94%	92.99%	92.42%	94%	93%	97%

Grafik, Realisasi anggaran TA 2020,2021 dan 2022



Jika realisasi indikator ini dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 92,42%, 2021 sebesar 92,99%, 2020 sebesar 79,40% maka dapat dinyatakan kinerja tahun 2022 **Baik**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah sebesar 96% capaian tahun ini sebesar 92,42%, sehingga terjadi penurunan sebesar 104%.
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)
Untuk kegiatan Realisasi Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - a. Analisa penyebab kegagalan capaian :
 1. Realisasi belanja barang sampai dengan desember 2022 sangat rendah jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal, masih ada beberapa kegiatan kurang optimal dalam pelaksanaanya, sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang rendah (88,86%)
 - b. Alternatif solusi yang dilakukan :
 1. Melakukan monitoring dan update RPD, setiap ada perubahan atau revisi dari masing-masing PIC
6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
 - a. Pelaksanaan kegiatan harus berazaskan kepada kewajaran, transparansi dan efisiensi serta pembiayaan mengacu pada standar biaya umum (SBU)yang berlaku.

- b. Alokasi anggaran dalam Dipa sebesar Rp32.357.145.000,- dan realisasi sebesar Rp29.902.870.959,- atau 92,42%.
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Akuntabilitas Kinerja, yaitu : Pertemuan Perencanaan Internal yang melibatkan narasumber yang handal dari Kementerian Keuangan atau Kemenpan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPFK Jakarta yang merupakan awal dari Renstra BPFK Jakarta 2020-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tahun 2022 secara umum **berhasil** mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Pencapaian pada tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi program yang mendukung terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, dengan melakukan inovasi diharapkan pencapaian indikator kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yang ada pada Renstra Kemkes 2025-2029 dapat tercapai.

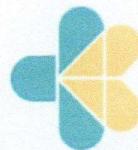
Selain melakukan inovasi, yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengoptimalkan sistem

informasi yang saling terintegrasi baik di internal maupun eksternal Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, diharapkan dengan adanya Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai target kinerja.

Lampiran – lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Niken Wastu Palupi, MKM.

Jabatan : Plt.Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPK) Jakarta
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

✓ Pihak Kedua,

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Pihak Pertama



dr. Niken Wastu Palupi, MKM.
NIP 196812312002122006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI. 1	Indeks kepuasan pelanggan	80
2	Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	210 Pelayanan
		KPI. 3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	80 Lingkup Akreditasi
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	56 SOP
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI. 5	Percentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	90%
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi penguji pemerintah dan swasta	KPI. 6	Percentase Institusi Penguji fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	80%
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI. 7	Percentase Pemenuhan Kompetensi SDM	85%
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	35000 Sertifikat
		KPI. 9	Pendapatan PNBP	9 Miliar
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI.10	Realisasi Anggaran	95%

Kegiatan

- Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan pada Program Pembinaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Anggaran

Rp32.357.145.000,-

✓ Pihak Kedua,

Aad

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Jakarta, 1 Desember 2021

Pihak Pertama,



dr. Miken Wastu Palupi, MKM.
NIP. 196812312002122006

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPFK JAKARTA

NO	SASARAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PIC	BASELINE	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI1	Indeks kepuasan pelanggan	Tata Operasional	72	74	88	90	92	94
2	Peningkatan kualitas dan cakupan leis, pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Tata Operasional	125	129	155	160	165	170
3	Peningkatan ketepatan standar pelayanan minimum	KPI3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Tata Operasional	54	54	60	65	70	75
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Tata Operasional	27	32	45	55	65	75
5	Peningkatan pembinaan Teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI5	Persentase Tingkat kesindatan alat ukur dan kalibrator	Tata Operasional	94%	55%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI6	Persentase Institusi Pengujian fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Bimbingan Teknis & Kemirian	50%	50%	70%	80%	90%	100%
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI7	Persentase Peningkahan Kompetensi SDM	Bimbingan Teknis & Kemirian	65%	65%	75%	85%	95%	100%
8	Pewujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI8	Jumlah sertifikat/laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Pelayanan Teknis	24934	35000	40000	42000	45000	50000
		KPI9	Pendapatan PNBP	Tata Usaha	8 M	8 M	8,5 M	9 M	9,5 M	10 M
		KPI10	Realisasi anggaran	Tata Usaha	94%	100%	100%	100%	100%	100%


 Jakarta
 Kepala Balai Pengembangan Fasilitas
 Kesehatan Jakarta
 NIP. 196306121989031003

Maret 2021
 J. Pastowo Nugroho, MM.


2. Matrik Indikator Kinerja Utama

3. Laporan realisasi anggaran

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian: 024 KEMENTERIAN KESIHATAN
 Unit Organisasi: 04 DITJEN PELAYANAN KESIHATAN
 Satuan Kerja : 552887 BALAI PENGAMANAN PASILITAS KESIHATAN JAKARTA

Hal 1 dari 12

Urutan	Page Revisi	Lock Page	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	32,367,145,000	0	24,744,417,619	5,158,463,440	29,902,870,959	92.42 %	2,454,274,041
Dg. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	11,028,799,000	0	8,758,149,457	1,588,542,650	10,346,692,107	93.82 %	682,106,893
DG. 6388 -Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yantek	11,028,799,000	0	8,758,149,457	1,588,542,650	10,346,692,107	93.82 %	682,106,893
BJK Pengidikan dan Pengujian Peralatan	99,630,000	0	44,380,800	49,777,800	94,158,600	94.51 %	5,471,400
BJK.001 Layanan Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi	99,630,000	0	44,380,800	49,777,800	94,158,600	94.51 %	5,471,400
(BJ) Layanan Pengujian Alat dan Proteksi Radiasi	99,630,000	0	44,380,800	49,777,800	94,158,600	94.51 %	5,471,400
051.0A Kegiatan Pengujian Kalibrasi dan Inspeksi di Fasyankes DPK, TPK,Deraht Bencana (Sksi Yantek)	99,630,000	0	44,380,800	49,777,800	94,158,600	94.51 %	5,471,400
524111 Belanja Perjalanan Diatas Biasa	99,630,000	0	44,380,800	49,777,800	94,158,600	94.51 %	5,471,400
CM Sarana Bidang Kesehatan	4,346,029,000	0	3,741,588,077	416,625,323	4,158,213,600	95.08 %	187,815,400
CM.001 Obat-obatan dan BPNT	539,269,000	0	492,466,350	2,250,000	494,716,350	91.71 %	41,552,650
(CM) Pengadaan Obat-obatan dan BPNT Pelayanan Terpadu	539,269,000	0	492,466,350	2,250,000	494,716,350	91.71 %	41,552,650
051.0A Pengadaan TLD Badge	404,000,000	0	404,000,000	0	404,000,000	100.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	404,000,000	0	404,000,000	0	404,000,000	100.00 %	0
051.0B Pengadaan Film Badge	22,709,000	0	13,200,000	0	13,200,000	58.15 %	9,500,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,709,000	0	13,200,000	0	13,200,000	58.15 %	9,500,000
051.0C Habis Pakai Lah	112,569,000	0	75,266,350	2,250,000	77,516,350	68.86 %	35,052,650
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	112,569,000	0	75,266,350	2,250,000	77,516,350	68.86 %	35,052,650
CM.002 Alat Kalibrasi	1,806,769,000	0	3,249,121,727	414,375,523	3,661,497,250	96.21 %	143,352,750
(CM) Pengadaan Alat Kalibrasi	1,806,769,000	0	3,249,121,727	414,375,523	3,661,497,250	96.21 %	143,352,750
051.0A Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi	2,536,006,000	0	2,338,886,361	114,851,280	2,483,739,611	97.94 %	52,266,359
521811 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,536,006,000	0	2,338,886,361	114,851,280	2,483,739,611	97.94 %	52,266,359
051.0B Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi (PWP)	503,561,000	0	312,449,636	125,009,843	437,459,479	86.87 %	66,101,521
521111 Belanja Keperlilan Perkantoran	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
522111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498,561,000	0	312,449,636	125,009,843	437,459,479	87.74 %	61,101,521
051.0C Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi (Efisiensi)	767,193,000	0	597,785,730	141,512,400	742,298,130	96.76 %	21,894,870
521111 Belanja Keperlilan Perkantoran	5,885,000	0	0	5,885,000	5,885,000	100.00 %	0
Lock Page adalah page yang selesai dalam proses review revisi DIPA atau PMK. Lock page akan hilang setelah usulan revisi DIPA/PMK selanjutnya menjadi DIPA.							
521111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	761,308,000	0	597,785,730	138,627,400	736,413,130	96.73 %	21,894,870
CM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	243,500,000	0	243,500,000	0	243,500,000	100.00 %	0
CM.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	243,500,000	0	243,500,000	0	243,500,000	100.00 %	0
(CM) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi & Balai	243,500,000	0	243,500,000	0	243,500,000	100.00 %	0

051.04 Pengembangan Aplikasi SIMPL	243,500,000	0	243,500,000	0	243,500,000	100,00 %	0
536111 Belanja Modal Lainnya	243,500,000	0	243,500,000	0	243,500,000	100,00 %	0
051 Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,459,630,000	0	3,494,631,418	662,657,382	4,157,288,780	93,22 %	302,341,230
051.02 Layanan Umum	4,459,630,000	0	3,494,631,418	662,657,382	4,157,288,780	93,22 %	302,341,230
052 Layanan Pengembangan Perguruan Tinggi dan Fasilitas PTK Vertikal	2,322,355,000	0	1,725,661,783	132,662,226	2,161,956,000	93,18 %	159,391,961
052.04 Kegiatan Akreditasi : Surveilai KAN ke BPK (Seksi TM&P)	91,641,000	0	88,602,000	0	88,602,000	96,68 %	3,042,000
521211 Belanja Bahan	12,484,000	0	12,428,000	0	12,428,000	99,55 %	56,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	66,500,000	0	66,000,000	0	66,000,000	99,25 %	500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,160,000	0	10,174,000	0	10,174,000	91,16 %	986,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	0	0	0,00 %	1,500,000
052.05 Tindakan Perbaikan Surveilai KAN Lab Pengujian SNI 17025, dan PIP SNI 17043 (Seksi Taap)	157,792,000	0	151,011,000	0	151,011,000	95,70 %	6,781,000
521211 Belanja Bahan	350,000	0	350,000	0	350,000	100,00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,136,000	0	1,136,000	0	1,136,000	100,00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,360,000	0	0	0	0	0,00 %	3,360,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	147,546,000	0	144,125,000	0	144,125,000	97,58 %	3,421,000
052.06 Kegiatan Akreditasi dan Perpanjangan Ijin (Seksi TM&P)	10,250,000	0	6,600,000	0	6,600,000	61,39 %	3,650,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,450,000	0	6,450,000	0	6,450,000	76,33 %	2,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	150,000	0	150,000	8,33 %	1,650,000
052.07 Kegiatan Akreditasi : Audit Internal (Seksi TM&P)	24,192,000	0	23,712,000	0	23,712,000	98,02 %	480,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,192,000	0	23,712,000	0	23,712,000	98,02 %	480,000
052.08 Interkomparasi Lab, Penantusan Dosis Perorangan dan Lab Kalibrasi AHK (Seksi TM&P)	77,107,000	0	73,976,865	0	73,976,865	95,91 %	3,130,135

*lock pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses umulan revisi DIPA atau PKL. Lock pagu akan hilang setelah umulan revisi DIPA/PKL selesai menjadi DPA.

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,850,000	0	8,700,000	0	8,700,000	98,31 %	150,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,247,000	0	63,476,865	0	63,476,865	95,82 %	2,770,135
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,010,000	0	1,800,000	0	1,800,000	89,55 %	210,000
052.09 Penyusunan dan Revisi Metode Pengujian Lab Kalibrasi, Inspeksi serta Protokol IP (Seksi TM&P)	227,142,000	0	212,510,810	0	212,510,810	93,56 %	14,631,190
521211 Belanja Bahan	1,829,000	0	786,800	0	786,800	43,02 %	1,042,200
522151 Belanja Jasa Profesi	16,200,000	0	12,600,000	0	12,600,000	77,78 %	3,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,603,000	0	62,834,010	0	62,834,010	89,00 %	7,758,990
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	450,000	0	450,000	50,00 %	450,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137,610,000	0	135,840,000	0	135,840,000	98,71 %	1,770,000
052.10 Kegiatan Akreditasi : Kaji Ulang Dokumen Manajemen dan Teknis Serta Tinjauan Manajemen (Seksi TM&P) di BPK Jakarta	414,752,000	0	261,002,150	137,571,700	401,573,850	96,82 %	13,178,150
521211 Belanja Bahan	8,525,000	0	3,210,150	1,721,700	4,931,850	57,85 %	3,593,150
522151 Belanja Jasa Profesi	21,600,000	0	16,200,000	5,400,000	21,600,000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,800,000	0	3,372,000	568,000	3,940,000	82,08 %	860,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720,000	0	0	150,000	150,000	20,83 %	570,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	379,107,000	0	241,220,000	129,732,000	370,952,000	97,45 %	8,155,000
052.0H Kegiatan Uji Coba Metode, Simulasi Pengujian Dan Pengecekan Antara (Seksi TM&P)	56,980,000	0	56,400,400	0	56,400,400	98,98 %	579,600

052.0P	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lintas Program dan Sektor (Seksi TnP)	98,841,000	0	81,994,846	11,412,000	93,406,846	91,50 %	5,437,154
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95,094,000	0	79,294,846	10,362,000	89,656,846	91,28 %	5,437,154
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750,000	0	2,700,000	1,050,000	3,750,000	100,00 %	0
052.0Q	Workshop Teknis Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Radiasi Terhadap Mutu Layanan (IPFK Swasta IPFK Dinkes)	3,427,000	0	2,700,000	320,000	3,020,000	88,12 %	407,000
521211	Belanja Bahan	1,477,000	0	900,000	320,000	1,220,000	82,60 %	257,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100,00 %	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	0	0	0	0,00 %	150,000
052.0R	Bimtek terhadap Institusi Pengujian Alat Kesehatan	28,841,000	0	18,194,465	6,230,000	21,424,465	81,69 %	4,416,535
521211	Belanja Bahan	345,000	0	0	200,000	200,000	57,97 %	145,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,896,000	0	17,594,465	6,030,000	23,624,465	81,69 %	4,271,535
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100,00 %	0
052.0S	Jejaring Kerja/Kemitraan dan Pemasaran Layanan	91,340,000	0	66,089,180	14,431,060	80,523,240	88,16 %	10,816,760
521211	Belanja Bahan	36,590,000	0	30,883,800	0	30,883,800	81,41 %	5,706,200
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	2,700,000	1,800,000	4,500,000	83,33 %	900,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,600,000	0	28,905,380	12,634,060	41,539,440	91,10 %	4,060,560
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750,000	0	3,600,000	0	3,600,000	96,00 %	150,000
052.0T	Kegiatan Pameran dan Kehutanan IPFK Jakarta	117,686,000	0	104,354,677	3,447,000	107,801,677	91,60 %	9,884,323
521211	Belanja Bahan	65,990,000	0	61,560,200	1,487,000	63,047,200	95,54 %	2,942,800
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,936,000	0	28,454,477	1,960,000	30,414,477	82,34 %	6,521,323
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,760,000	0	14,340,000	0	14,340,000	97,15 %	420,000
052.0W	Kegiatan Survey/Koordinasi/Evaluasi WCU Pelayanan IPFK Jakarta (Seksi Yantek)	208,568,000	0	131,312,056	46,590,746	177,902,802	85,30 %	30,665,198
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	204,758,000	0	129,062,656	46,140,746	175,202,802	85,57 %	29,555,198
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,810,000	0	2,250,000	450,000	2,700,000	70,87 %	1,110,000

Lock Page adalah judul page yang sudah dalam proses unvan revisi DIPA atau PKM. Lock page akan hilang setelah unvan revisi DIPA/PKM selesai menjadi DIPA.

052.0Y	Pendampingan Mewtu Sather BLU IPFK Jakarta	99,355,000	0	97,440,000	0	97,440,000	98,07 %	1,915,000
521211	Belanja Bahan	987,000	0	400,000	0	400,000	40,53 %	587,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93,898,000	0	92,549,000	0	92,549,000	98,59 %	1,328,000
053.0A	Layanan TI dan Rambu Tanggap Bencana	2,137,472,000	0	1,765,957,685	27,655,156	1,392,222,771	82,26 %	114,069,229
053.0A	Honor Pengelola PMPP (Subbag. TI)	55,200,000	0	46,000,000	9,200,000	55,200,000	100,00 %	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	55,200,000	0	46,000,000	9,200,000	55,200,000	100,00 %	0
053.0B	Honor PPMPN IPFK Jakarta dan IPFFPK Palenongan (Subbag. TI)	1,652,274,000	0	1,149,490,162	121,413,850	1,570,904,012	95,08 %	81,369,988
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,652,274,000	0	1,149,490,162	121,413,850	1,570,904,012	95,08 %	81,369,988
053.0C	Penagihann PMPP (Subbag. TI)	36,490,000	0	15,986,000	11,899,700	27,885,700	76,42 %	8,604,300
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,990,000	0	12,436,000	11,299,700	23,735,700	74,20 %	8,254,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	3,550,000	600,000	4,150,000	92,22 %	350,000
053.0D	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	229,944,000	0	176,223,400	48,515,500	224,738,900	97,74 %	5,205,100
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	229,944,000	0	176,223,400	48,515,500	224,738,900	97,74 %	5,205,100
053.0E	Operasional Perjalanan IPFFPK Palenongan (IPFFPK)	130,170,000	0	60,322,073	22,125,086	82,448,159	63,34 %	47,721,841
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108,990,000	0	57,442,073	20,676,086	78,118,159	71,67 %	30,871,841

521211	Belanja Bahan	630,000	0	466,200	0	466,200	75,19 %	153,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,040,000	0	4,018,200	0	4,018,200	99,46 %	21,800
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52,120,000	0	51,916,000	0	51,916,000	99,23 %	401,000
052.01	Pertemuan Bulan Matu BPK - Pelanggaran (Seksi TNP)	78,545,000	0	0	71,550,000	71,550,000	91,09 %	6,995,000
521211	Belanja Bahan	2,290,000	0	0	1,375,000	1,375,000	60,04 %	915,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800,000	0	0	0	0	0,00 %	800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	72,455,000	0	0	67,175,000	67,175,000	92,71 %	5,280,000
052.02	Uji banding /Uji Profisiensi Laboratorium (Kalibrasi , PD dan Ikes, serta Sarana Prasarana) (Seksi TNP)	7,258,000	0	0	5,988,000	5,988,000	82,39 %	1,280,000

Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses ujiuln revisi DIPA atau PK. Lock page akan hilang setelah ujiuln revisi DIPA/PK selesai menjadi DIPA.

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100,000	0	0	0	0	0,00 %	100,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,808,000	0	0	5,988,000	5,988,000	87,96 %	820,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360,000	0	0	0	0	0,00 %	360,000
052.03	Pengembangan Teknologi Laboratorium (Seksi TNP)	82,300,000	0	48,032,230	29,471,900	77,504,130	94,17 %	4,795,470
521211	Belanja Bahan	2,355,000	0	2,027,200	0	2,027,200	79,34 %	327,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500,000	0	0	0	0	0,00 %	500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	0	0	0	0	0,00 %	900,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74,355,000	0	42,945,030	29,471,900	72,416,930	97,39 %	1,938,670
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,990,000	0	3,060,000	0	3,060,000	76,69 %	930,000
052.04	Pertemuan Teknis Laboratorium Pengujian/Kalibrasi dan inspeksi (Seksi TNP)	166,129,000	0	78,204,562	77,080,000	155,284,562	93,47 %	10,841,438
521211	Belanja Bahan	8,995,000	0	6,744,500	0	6,744,500	71,98 %	2,250,500
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	6,300,000	0	6,300,000	87,50 %	900,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,008,000	0	21,118,062	0	21,118,062	84,45 %	3,889,938
524113	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	121,926,000	0	41,042,000	77,080,000	121,122,000	96,95 %	3,804,000
052.05	Penyelenggaraan Uji Profisiensi (UP) (Seksi TNP)	92,524,000	0	76,719,363	0	76,719,363	82,92 %	15,804,637
521211	Belanja Bahan	84,000	0	526,000	0	526,000	62,32 %	318,000
522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	5,700,000	0	5,700,000	95,00 %	300,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,280,000	0	19,043,363	0	19,043,363	58,99 %	13,236,637
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	150,000	0	150,000	50,00 %	150,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53,100,000	0	51,300,000	0	51,300,000	96,61 %	1,800,000
052.06	Pemparan Hasil Uji Profisiensi (UP) (Seksi TNP) di BPK Jakarta	76,057,000	0	72,085,379	0	72,085,379	94,78 %	3,971,621
521211	Belanja Bahan	1,429,000	0	860,000	0	860,000	60,18 %	569,000
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,828,000	0	13,025,379	0	13,025,379	82,29 %	2,802,621
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	150,000	0	150,000	50,00 %	150,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53,100,000	0	52,650,000	0	52,650,000	99,15 %	450,000

Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses ujiuln revisi DIPA atau PK. Lock page akan hilang setelah ujiuln revisi DIPA/PK selesai menjadi DIPA.

052.07	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengujian / Kalibrasi dan Inspeksi (Seksi TNP)	111,615,000	0	75,121,800	30,906,820	105,028,620	94,99 %	5,586,380
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110,175,000	0	73,681,800	30,906,820	104,588,620	94,93 %	5,586,380
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	100,00 %	0

052.0F	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lintas Program dan Sektor (Seksi T/M/P)	98,841,000	0	81,991,846	11,412,000	93,406,846	91,50 %	5,437,154
521111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95,094,000	0	79,294,846	10,362,000	89,656,846	94,28 %	5,437,154
521113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750,000	0	2,700,000	1,050,000	3,750,000	100,00 %	0
052.0G	Workshop Teknis Kalibrasi Alat Ukar Standar dan Kalibrasi Terhadap Mutu Layanan (BPK Swasta - BPKD Dinkes)	3,427,000	0	2,700,000	320,000	3,020,000	88,12 %	407,000
521211	Belanja Bahan	1,477,000	0	900,000	320,000	1,220,000	82,60 %	257,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100,00 %	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	0	0	0	0,00 %	150,000
052.0H	Bintek terhadap Institusi Pengujian Alat Kesehatan	28,841,000	0	18,194,465	6,230,000	24,424,465	84,69 %	4,416,535
521211	Belanja Bahan	345,000	0	0	200,000	200,000	57,97 %	145,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,866,000	0	17,594,465	6,030,000	23,624,465	84,69 %	4,271,535
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100,00 %	0
052.0I	Jejaring Kerja/Kemitraan dan Pemasaran Layanan	91,340,000	0	66,089,180	11,434,060	80,523,240	88,16 %	10,816,760
521211	Belanja Bahan	36,590,000	0	30,883,800	0	30,883,800	84,41 %	5,706,200
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	2,700,000	1,800,000	4,560,000	83,33 %	900,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,600,000	0	28,905,380	12,634,060	41,539,440	91,10 %	4,060,560
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750,000	0	3,600,000	0	3,600,000	96,00 %	150,000
052.0J	Kegiatan Pameran dan Kelepasan BPK Jakarta	117,686,000	0	101,354,677	3,447,000	107,801,677	91,60 %	9,884,323
521211	Belanja Bahan	65,990,000	0	61,560,200	1,487,000	63,047,200	95,54 %	2,942,800
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,936,000	0	28,154,677	1,960,000	30,414,677	82,34 %	6,521,523
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,760,000	0	14,340,000	0	14,340,000	97,15 %	420,000
052.0K	Kegiatan Survey/Koordinasi/Evaluasi WU Pelayanan BPK Jakarta (Seksi Tanek)	208,568,000	0	131,312,056	16,590,746	177,902,802	85,30 %	30,665,198
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201,758,000	0	129,062,056	16,140,746	175,202,802	85,57 %	29,555,198
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,810,000	0	2,250,000	450,000	2,700,000	70,87 %	1,110,000

Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses upload revisi DIPA atau PKL. Lock page akan hilang setelah upload revisi DIPA/PKL selesai menjadi DIPA.

052.0L	Pendampingan Memaju Satker BLU BPK Jakarta	99,355,000	0	97,140,000	0	97,440,000	98,07 %	1,915,000
521211	Belanja Bahan	987,000	0	100,000	0	400,000	40,53 %	587,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	93,868,000	0	92,540,000	0	92,540,000	98,59 %	1,328,000
053.0A	Layanan TI dan Kunci Tangga BTP Vertikal	2,137,271,000	0	1,755,557,655	227,655,126	1,997,222,771	82,26 %	14,546,229
053.0A	Honor Pengelola PMB (Subbag. TU)	55,200,000	0	46,000,000	9,200,000	55,200,000	100,00 %	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	55,200,000	0	46,000,000	9,200,000	55,200,000	100,00 %	0
053.0B	Honor PMPN BPK Jakarta dan UPPTPK Palembang (Subbag. TU)	1,652,271,000	0	1,449,490,162	121,413,850	1,570,904,012	95,08 %	81,569,988
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,652,274,000	0	1,449,490,162	121,413,850	1,570,904,012	95,08 %	81,569,988
053.0C	Penagihan PMNP (Subbag. TU)	36,450,000	0	15,986,000	11,899,700	27,885,700	76,42 %	8,604,300
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,990,000	0	12,436,000	11,299,700	23,735,700	71,20 %	8,254,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	3,550,000	600,000	4,150,000	92,22 %	350,000
053.0D	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	229,944,000	0	176,223,400	48,515,500	224,738,900	97,71 %	5,205,100
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	229,944,000	0	176,223,400	48,515,500	224,738,900	97,71 %	5,205,100
053.0E	Operasional Perjalanan UPPTPK Palembang (UPPTPK)	130,170,000	0	60,322,073	22,126,986	82,448,159	63,34 %	17,721,841
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108,990,000	0	57,442,073	20,676,086	78,118,159	71,67 %	30,871,841

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,180,000	0	2,880,000	1,450,000	4,330,000	20,44 %	16,850,000
053.0F	Riwaya Lembur PPPNPK Teknis dan Admin	3,104,000	0	2,456,000	0	2,456,000	79,12 %	648,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,104,000	0	2,456,000	0	2,456,000	79,12 %	648,000
053.0G	Item Pengganti	90,000	0	90,000	0	90,000	100,00 %	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,000	0	90,000	0	90,000	100,00 %	0
053.0H	Bawoner Tenaga PPPNPK BPPK Jakarta (Efisiensi PNPB)	30,000,000	0	15,000,000	14,500,000	29,500,000	98,33 %	500,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30,000,000	0	15,000,000	14,500,000	29,500,000	98,33 %	500,000
BB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	48,912,000	0	206,648,866	216,815,000	423,461,866	94,33 %	25,450,134
BB.01	Layanan Sarana Internal	48,912,000	0	206,648,866	216,815,000	423,461,866	94,33 %	25,450,134
052.01	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	10,912,000	0	206,648,866	216,815,000	423,461,866	94,33 %	25,450,134
052.04	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	81,494,000	0	48,196,000	28,500,000	76,696,000	90,77 %	7,798,000

Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses umulen revisi DPA atau POK. Lock page akan hilang setelah umulen revisi DPA/POK selesai menjadi DPA.

521111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81,494,000	0	48,196,000	28,500,000	76,696,000	90,77 %	7,798,000
052.0B	Pengadaan Buku Metode Kerja	19,622,000	0	17,386,866	0	17,386,866	88,61 %	2,235,134
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,722,000	0	504,000	0	504,000	18,52 %	2,218,000
536111	Belanja Modal Lainnya	16,900,000	0	16,882,866	0	16,882,866	99,90 %	17,134
052.0C	Pengadaan Server (Efisiensi PNPB)	96,240,000	0	96,000,000	0	96,000,000	99,75 %	210,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96,240,000	0	96,000,000	0	96,000,000	99,75 %	210,000
052.0D	Pengadaan Pengolahan Data (Efisiensi PNPB)	228,556,000	0	45,064,000	168,315,000	213,379,000	93,36 %	15,177,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228,556,000	0	45,064,000	168,315,000	213,379,000	93,36 %	15,177,000
052.0E	Pengadaan Soundsystem (Efisiensi PNPB)	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	100,00 %	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	100,00 %	0
EK	Layanan Manajemen SDM Internal	1,431,098,000	0	1,027,402,296	242,665,965	1,270,069,261	88,75 %	161,028,739
EK.001	Layanan Kepengawaihan Satker UPT Vertikal	1,431,098,000	0	1,027,402,296	242,665,965	1,270,069,261	88,75 %	161,028,739
051	Layanan Kepengawaihan satker UPT Vertikal	1,431,098,000	0	1,027,402,296	242,665,965	1,270,069,261	88,75 %	161,028,739
051.0A	Peningkatan Kompetensi Personil: Kemitraan dan Bimtek	33,256,000	0	2,060,000	24,950,000	27,010,000	81,22 %	6,216,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,300,000	0	0	14,700,000	14,700,000	96,08 %	600,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,096,000	0	2,060,000	10,250,000	12,310,000	76,48 %	3,766,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,860,000	0	0	0	0	0,00 %	1,860,000
051.0B	Penyelenggaraan Inhouse Training untuk Peningkatan Kompetensi SDM Teknis dan Manajemen	311,149,000	0	175,550,500	98,592,865	274,143,365	88,11 %	37,005,635
521211	Belanja Bahan	79,391,000	0	48,670,500	15,890,865	64,561,365	81,32 %	14,831,635
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	66,000,000	0	2,200,000	61,825,000	63,826,000	96,71 %	2,174,000
522151	Belanja Jasa Profesi	138,600,000	0	116,100,000	16,200,000	132,300,000	95,45 %	6,300,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,256,000	0	0	4,576,000	4,576,000	44,62 %	5,680,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,900,000	0	8,580,000	300,000	8,880,000	52,54 %	8,020,000
051.0C	Peningkatan Kompetensi Personil UPFFPK Palembang	163,474,000	0	76,915,252	42,504,100	119,419,352	73,06 %	44,054,648
521211	Belanja Bahan	15,646,000	0	1,638,000	2,476,500	4,114,500	26,30 %	11,531,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,170,000	0	4,440,000	0	4,440,000	85,88 %	730,000

Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses umulen revisi DPA atau POK. Lock page akan hilang setelah umulen revisi DPA/POK selesai menjadi DPA.

522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	0	0	0	0,00 %	7,200,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135,458,000	0	70,837,352	40,027,600	110,864,852	81,81 %	24,593,148

051.00	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Teknis dan Manajemen	276,372,000	0	163,141,600	68,334,000	231,475,600	83,76 %	41,896,400
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	157,086,000	0	104,656,000	37,400,000	142,690,000	90,43 %	15,036,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,906,000	0	36,381,600	28,614,000	61,995,600	80,33 %	15,910,400
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,380,000	0	22,110,000	2,320,000	21,130,000	63,65 %	13,950,000
051.0E	Penyelenggaraan Pelatihan Kalibrasi Alkes Terakreditasi dan Tempat Non Personil TEM (LPSE Kesehatan)	132,372,000	0	96,910,940	8,286,000	105,196,940	79,47 %	27,175,060
521211	Belanja Bahan	53,272,000	0	38,440,940	5,469,000	43,900,940	82,41 %	9,371,060
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	0	0	0	0	0,00 %	1,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	8,190,000	0	8,190,000	75,83 %	2,610,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,080,000	0	10,380,000	2,825,000	13,206,000	54,84 %	16,874,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	900,000	0	900,000	25,00 %	2,700,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,620,000	0	39,000,000	0	39,000,000	98,41 %	620,000
051.0F	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BPK Jakarta ke Jawa Barat	514,475,000	0	512,824,004	0	512,824,004	99,68 %	1,650,996
521211	Belanja Bahan	693,000	0	339,700	0	339,700	49,02 %	353,300
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	158,500,000	0	158,488,020	0	158,488,020	99,99 %	11,980
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000	100,00 %	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	349,102,000	0	347,816,284	0	347,816,284	99,63 %	1,285,716
VA	Program Dukungan Manajemen	21,428,346,000	0	15,986,268,062	3,569,910,790	19,556,178,852	91,69 %	1,772,167,148
VIA.0813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Perilayanan Kesehatan	21,428,346,000	0	15,986,268,062	3,569,910,790	19,556,178,852	91,69 %	1,772,167,148
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,873,408,000	0	15,643,472,443	3,312,112,780	19,135,585,233	91,77 %	1,717,822,767
EBA.952	Layanan Umum	565,057,000	0	339,906,893	141,923,408	481,833,211	85,27 %	83,223,789
059.	Layanan Penyelegeraan Tugas dan Tugasi DIT Vertical Dirjen Bades	365,651,930	0	169,306,867	161,923,348	481,833,211	85,27 %	83,223,789
059.0A	Pertemuan dengan Wadegan Regiatan Administrasi Umum	140,237,000	0	61,186,388	51,236,240	112,722,628	80,38 %	27,514,372
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,267,000	0	4,800,000	3,240,000	8,040,000	78,31 %	2,227,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100,00 %	0

Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses analisa revisi DPA atau PM. Lock page akan hilang setelah analisa revisi DPA/PM selesai menjadi DPA.

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102,090,000	0	19,205,830	44,251,240	93,457,070	91,54 %	8,632,930
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100,00 %	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,080,000	0	280,000	280,000	560,000	5,56 %	9,520,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,600,000	0	5,000,558	3,465,400	8,465,558	54,27 %	7,134,442
059.0B	Pembinaan Kepegawaian, dan Pendampingan UPFFPK Palembang menjadi Loka (Umum dan Teknis) di UPFFPK Palembang (Subbag.II)	181,614,000	0	135,618,335	34,222,026	169,840,361	93,52 %	11,773,639
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181,614,000	0	135,618,335	34,222,026	169,840,361	93,52 %	11,773,639
059.0C	Rapor Kerja dan Evaluasi Kinerja BPK Jakarta dan UPFFPK Palembang (Subbag.III)	5,726,000	0	0	0	0	0,00 %	5,726,000
521211	Belanja Bahan	326,000	0	0	0	0	0,00 %	326,000
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	0	0	0,00 %	5,400,000
059.0D	Pembinaan Program dan Pertemuan Lintas Sektoral/Konsultasi dan Koordinasi (Subbag.III)	237,480,000	0	142,805,080	56,465,142	199,270,222	83,91 %	38,209,778
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	265,080,000	0	132,195,080	46,315,142	178,510,222	87,04 %	26,569,778
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	5,010,000	0	5,010,000	69,58 %	2,190,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,400,000	0	5,600,000	280,000	5,880,000	70,00 %	2,520,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16,800,000	0	0	9,870,000	9,870,000	58,75 %	6,930,000

00A.994	Layanan Perkantoran	20,308,551,000	0	15,303,562,640	3,370,189,382	18,673,752,822	91,95 %	1,634,598,978
001 Gaji dan Tunjangan								
001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12,324,903,000	0	10,222,035,395	1,314,697,163	11,636,732,558	91,42 %	688,170,442
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,006,121,000	0	3,960,509,900	0	3,990,509,900	99,61 %	15,611,100
511119	Belanja Pendekatan Gaji PNS	220,000	0	63,012	0	63,012	28,61 %	156,988
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	346,537,000	0	316,782,980	0	316,782,980	91,41 %	29,754,020
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	110,384,000	0	104,148,296	0	104,148,296	94,35 %	6,235,794
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	50,274,000	0	35,460,000	0	35,460,000	70,53 %	14,814,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	306,820,000	0	301,664,000	0	301,664,000	98,32 %	5,156,000
511125	Belanja Tunj. PPn PNS	16,820,000	0	16,566,184	0	16,566,184	98,49 %	253,816
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	262,265,000	0	261,363,780	0	261,363,780	99,66 %	899,220
Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses umulan revisi DIPA atau PK. Lock page akan hilang setelah umulan revisi DIPA/PK selesai menjadi DIPA.								
511129	Belanja Uang Makan PNS	520,000,000	0	413,178,000	68,888,000	482,066,000	92,71 %	37,934,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	385,156,000	0	339,900,000	0	339,900,000	88,20 %	45,456,000
511151	Belanja Tunjangan Umur PNS	185,400,000	0	140,375,000	0	140,375,000	75,71 %	45,025,000
512211	Belanja Uang Lebur	54,448,000	0	8,988,000	3,002,000	11,990,000	22,02 %	42,458,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjongan Khusus Kegiatan/Tinjera)	6,080,260,000	0	4,393,036,243	1,242,807,163	5,635,843,406	92,69 %	14,416,594
002 Operasional dan Penelitian Kantor								
002.0A	Langganan Baya dan Jasa	597,500,000	0	504,952,560	62,036,592	566,989,152	94,89 %	30,510,848
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,000,000	0	895,000	0	895,000	41,75 %	1,105,000
522111	Belanja Langganan Listrik	400,000,000	0	354,775,715	33,960,294	388,736,009	97,18 %	11,263,991
522112	Belanja Langganan Telepon	5,500,000	0	4,239,681	338,186	4,577,867	83,23 %	922,133
522113	Belanja Langganan Air	10,000,000	0	7,629,024	738,112	8,967,136	83,67 %	1,632,864
522119	Belanja Langganan Baya dan Jasa Lainnya	180,000,000	0	137,413,140	27,000,000	164,413,140	91,34 %	15,586,860
002.0B	Perasatan /Penelitianara Gedung Kantor	279,776,000	0	141,702,950	110,912,500	252,615,450	93,29 %	18,160,550
523111	Belanja Penelitianara Gedung dan Bangunan	270,776,000	0	141,702,950	110,912,500	252,615,450	93,29 %	18,160,550
002.0C	Perasatan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	307,280,000	0	179,706,404	53,711,273	233,417,677	75,96 %	73,862,323
523121	Belanja Penelitianara Peralatan dan Mesin	307,280,000	0	179,706,404	53,711,273	233,417,677	75,96 %	73,862,323
002.0D	Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	14,400,000	0	8,700,000	1,740,000	10,440,000	72,50 %	3,960,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14,400,000	0	8,700,000	1,740,000	10,440,000	72,50 %	3,960,000
002.0E	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	876,425,000	0	433,466,553	271,406,088	710,872,641	81,11 %	165,552,359
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	151,613,000	0	88,997,887	25,878,180	114,876,067	75,77 %	36,736,933
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	125,000,000	0	91,568,100	8,957,000	100,525,100	80,42 %	24,474,900
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	46,000,000	0	24,195,000	10,000,000	34,195,000	74,34 %	11,805,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	430,000,000	0	175,228,383	227,683,908	102,912,291	93,70 %	27,087,709
521811	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	87,812,000	0	31,183,183	0	31,183,183	35,51 %	56,628,817
521113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000	0	22,294,000	4,887,000	27,181,000	75,50 %	8,819,000
002.0F	Penelitianara Sarana Kantor	189,100,000	0	92,527,543	49,860,000	142,387,543	75,30 %	46,712,457
523121	Belanja Penelitianara Peralatan dan Mesin	189,100,000	0	92,527,543	49,860,000	142,387,543	75,30 %	46,712,457
Lock Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses umulan revisi DIPA atau PK. Lock page akan hilang setelah umulan revisi DIPA/PK selesai menjadi DIPA.								
002.0G	Honor Pengelola Anggaran	163,560,000	0	97,850,000	18,248,000	116,098,000	70,98 %	47,462,000

521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	163,560,000	0	97,850,000	18,248,000	116,098,000	70,98 %	47,462,000
002.08	Operasional Pimpinan	674,965,000	0	278,268,294	313,117,301	591,685,955	87,66 %	83,279,405
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,000,000	0	1,300,000	9,913,500	11,213,500	93,45 %	786,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	462,000,000	0	120,541,894	303,398,801	423,940,695	91,76 %	38,059,305
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,050,000	0	0	105,000	105,000	1,30 %	7,945,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	192,915,000	0	156,125,400	0	156,425,400	81,09 %	36,488,600
002.01	Pembiayaan Daya Tahan Tubuh	526,680,000	0	405,174,165	90,457,785	495,631,950	94,10 %	31,048,050
521113	Belanja Pembiayaan Daya Tahan Tubuh	526,680,000	0	405,174,165	90,457,785	495,631,950	94,10 %	31,048,050
002.03	Pakaian Seragam	112,594,000	0	109,341,771	0	109,341,771	97,11 %	3,252,229
521111	Belanja Koperium Perkantoran	112,594,000	0	109,341,771	0	109,341,771	97,11 %	3,252,229
002.06	Pemeriksaan Kesehatan	266,600,000	0	208,899,000	0	208,899,000	78,36 %	57,701,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	233,600,000	0	185,561,000	0	185,561,000	79,44 %	48,039,000
522102	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13,800,000	0	6,388,000	0	6,388,000	46,29 %	7,412,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,200,000	0	16,950,000	0	16,950,000	88,28 %	2,250,000
002.04	Jamuan Tam/Tapat Butuh	67,488,000	0	41,144,896	6,799,700	47,944,596	71,04 %	19,543,404
521111	Belanja Koperium Perkantoran	67,488,000	0	41,144,896	6,799,700	47,944,596	71,04 %	19,543,404
002.08	Honor PPNM	873,626,000	0	798,784,000	66,937,000	865,721,000	99,10 %	7,905,000
521111	Belanja Koperium Perkantoran	873,626,000	0	798,784,000	66,937,000	865,721,000	99,10 %	7,905,000
002.08	Pengadaan Jasa Kebersihan/Cleaning Service (Outsourcing)	579,900,000	0	408,537,634	75,045,042	483,582,676	83,39 %	96,317,324
521111	Belanja Koperium Perkantoran	579,900,000	0	408,537,634	75,045,042	483,582,676	83,39 %	96,317,324
002.00	Operasional IPT-PPK Palensang	984,778,000	0	565,184,851	214,588,110	809,772,961	82,23 %	175,005,039
521111	Belanja Koperium Perkantoran	148,240,000	0	85,366,854	28,098,170	113,435,024	76,52 %	34,804,976
521113	Belanja Pembiayaan Daya Tahan Tubuh	77,112,000	0	61,416,000	13,461,000	74,881,000	97,11 %	2,232,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,500,000	0	1,553,000	162,000	1,715,000	22,87 %	5,785,000
521801	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000	0	17,255,603	0	17,255,603	41,08 %	24,741,397
522111	Belanja Langganan Listrik	95,000,000	0	59,049,400	4,555,000	63,601,400	66,95 %	31,395,600

Stack Page adalah jumlah page yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau PK. Stack page akan hilang setelah usulan revisi DIPA/PK selama menjadi DIPA.

522112	Belanja Langganan Telepon	20,000,000	0	11,563,179	1,048,950	12,612,129	63,06 %	7,387,871
522141	Belanja Sewa	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000	100,00 %	0
523111	Belanja Peneliharaan Gedung dan Bangunan	339,496,000	0	152,789,265	186,502,690	339,291,955	99,94 %	204,045
523121	Belanja Peneliharaan Peralatan dan Mesin	87,430,000	0	8,191,550	10,787,300	18,978,850	21,71 %	68,451,150
002.08	Peneliharaan Alat Pengajaran kalibrasi (Tata Operasional)	1,477,776,000	0	707,286,624	684,332,828	1,391,619,452	94,17 %	86,156,548
523121	Belanja Peneliharaan Peralatan dan Mesin	1,261,820,000	0	634,382,952	608,389,078	1,242,772,030	98,49 %	19,047,970
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208,276,000	0	71,703,672	75,343,750	147,047,422	70,60 %	61,228,578
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,680,000	0	1,200,000	600,000	1,800,000	23,41 %	5,880,000
FAD - Perencanaan dan Penganggaran		377,038,000	0	327,817,619	14,680,000	342,497,619	90,84 %	34,540,381
FAD.01 - Perencanaan dan Penganggaran IPT Vertikal		377,038,000	0	327,817,619	14,680,000	342,497,619	90,84 %	34,540,381
(1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran IPT Vertikal		377,038,000	0	327,817,619	14,680,000	342,497,619	90,84 %	34,540,381
181.04	Pembahasan Internal dan Reviu KKAL (Sublog. IV)	377,038,000	0	327,817,619	14,680,000	342,497,619	90,84 %	34,540,381
521211	Belanja Bahan	400,000	0	300,000	0	300,000	75,00 %	100,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	9,000,000	0	9,000,000	83,33 %	1,800,000

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,094,000	0	70,050,900	14,680,000	84,730,900	83,81 %	16,363,100
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,331,000	0	2,852,000	0	2,852,000	17,23 %	13,499,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	218,191,000	0	215,614,719	0	215,614,719	98,96 %	2,578,281
FIE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	77,900,000	0	14,978,000	43,118,000	58,096,000	71,58 %	19,894,000
FIE.001	Laysan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan UPT Vertikal	77,900,000	0	14,978,000	43,118,000	58,096,000	71,58 %	19,894,000
18)	Laporan pemantauan dan evaluasi Efisiensi Program pelajaran kesadaran	77,900,000	0	14,978,000	43,118,30	58,096,000	71,58 %	19,894,000
18.1.04	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Trivulan, Senesteran dan Tahunan (Subbag. TI)	77,900,000	0	14,978,000	43,118,000	58,096,000	71,58 %	19,894,000
521211	Belanja Bahan	720,000	0	0	0	0	0,00 %	720,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,180,000	0	14,978,000	43,118,000	58,096,000	75,27 %	19,084,000

Lock Page adalah jumlah page yang sebenarnya dalam proses upload versi DPA atau PKL. Lock page akan hilang setelah upload versi DPA/PKL selesai menjadi DPA.

4. SK LAKIP



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPK) JAKARTA

Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta Pusat 10570
Telp. : (021) 4240406, 42882249, Fax. : (021) 4244168, 42882237
Email.: kontak@bpkjakarta.or.id - Website. : <http://bpkjakarta.or.id>



Komite Akuntabilitas Nasional
Laboratorium Kalsifikasi
LK-110-IDN
Laboratorium Pengujian
LP-469-IDN
Lembaran Inspeksi
LI-276-IDN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA
NOMOR : PS.03.01/XLVIII.1/0305/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DAN PENETAPAN KINERJA
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan;
b. bahawa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan dan menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 dan perubahannya No. No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perecepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12 tanggal, 28 Agustus 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT.

MEMUTUSKAN .

Menetapkan :

KESATU : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILAS KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim adalah sebagai berikut :

Pelindung : Kepala BPK Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota :

1. Kepala Seksi Tata Operasional
2. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
3. Kepala Seksi Kemitraan dan Bimtek

Sekretariat :

1. Ka. Instalasi Lab. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan
2. Ka. Instalasi Lab. Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray
3. Ka. Instalasi Lab. Pengujian/ Kalibrasi/ Inspeksi Sarana Prasarana (SP)
4. Ka. Instalasi Lab. Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Kalibrator Alat Kesehatan
5. Meilany Sianturi, SAP (Tata Usaha)
6. Yeni Utirah Kusdiana, SE. (Tata Usaha)

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data atau bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
3. Menyusun Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta,
4. Melakukan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
5. Menyusun laporan berkala BPK Jakarta (semesteran dan tahunan)
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja bertanggung jawab kepada kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dibebankan kepada DIPA Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dan perubahan terkait kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Januari 2018

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS
KESEHATAN JAKARTA,


Dr.J.Prastowo Nugroho,MHA
NIP.196306121989031003